



Penggunaan Aplikasi E-Reses DPRD dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bima

*Yasin¹, Muhammad Saleh², Yudi Mulyanto³

^{1,2,3}Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: yasingerindra2016@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| Article History Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-02 | The People's Representative Council (DPRD) is an extension of the community. Bima Regency DPRD in absorbing aspirations through the E-recess application. The research was conducted within the secretariat of the Bima Regency DPRD and also a number of people in Bima Regency. The data analysis used is qualitative to see the optimization and strategies used in using the e-recess application. The results showed that the implementation of the E-Recess by the Leaders and Members of the Bima Regency DPRD was carried out in 3 (three) stages, namely the planning stage, the implementation stage, and the reporting stage . The use of E-Recess in capturing people's aspirations by DPRD Leaders and Members, turns out to be far more effective than implementing a conventional recess. Strategies that need to be implemented in optimizing E-Recess are improving facilities and supporting facilities, increasing managing human resources, increasing socialization, facilitating the preparation of special computer equipment in each sub-district and/or village office, as well as features in the E-Recess application. While the results of the effectiveness analysis through quantitative tests, it was found that the use of the E-Recess was very effective, it was indicated by a sig (2-tailed) value = 0.000 < 0.05, likewise Tcount = 4,609 > Ttable = 2.01, so it can be concluded that the DPRD e-recess application in capturing community aspirations in Bima Regency is very effective. |
| Keywords: <i>Effectiveness; Strategy; E-recess and Community Aspirations Screening.</i> | |

| Artikel Info | Abstrak |
|--|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-02 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan perpanjangan tangan masyarakat. DPRD Kabupaten Bima dalam menyerap aspirasi melalui aplikasi E-reses. Penelitian dilakukan di lingkup sekretarian DPRD Kabupaten Bima dan juga sejumlah masyarakat Kabupaten Bima. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif untuk melihat optimalisasi dan strategi yang digunakan dalam penggunaan aplikasi e-reses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Penggunaan E-Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, ternyata jauh lebih efektif dibanding pelaksanaan reses konvensional. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan E-Reses adalah meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang, meningkatkan SDM pengelola, meningkatkan sosialisasi, memfasilitasi penyiapan perangkat komputer khusus di setiap kantor kecamatan dan/atau desa, serta fitur dalam aplikasi E-Reses. Sementara hasil analisis efektivitas melalui uji kuantitatif, diperoleh bahwa penggunaan E-Reses tersebut sangat efektif, hal itu ditandai dengan nilai sig (2-tailed) = 0.000 < 0,05, begitupun $T_{hitung} = 4.609 > T_{tabel} = 2.01$, maka dapat disimpulkan bahwa maka aplikasi e-reses DPRD dalam penjaringan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima sangat efektif. |
| Kata kunci: <i>Efektivitas; Strategi; E-reses dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.</i> | |

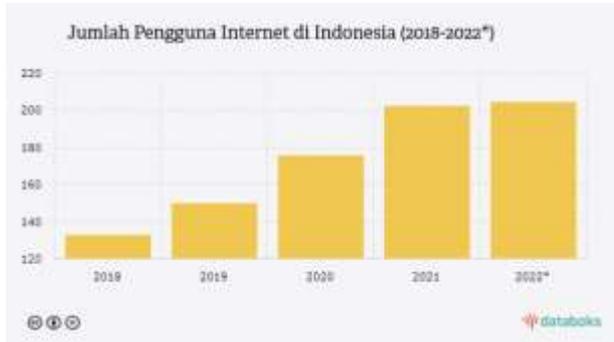
I. PENDAHULUAN

Teknologi berkembang dengan pesat, hampir seluruh lini kehidupan disertai dengan teknologi. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi internet pada kurun 2021-2022 mencapai 210 juta orang (APJII, 2022). Tahun 2019 atau tepatnya Sebelum pandemi, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta

orang. Artinya, selama wabah pengguna internet bertambah sebesar 35 juta orang.

Perkembangan teknologi ini pun disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui DPRD Kabupaten Bima. Saat ini, DPRD Kab. Bima memanfaatkan reses elektronik (e-reses) sebagai sarana dalam menyerap aspirasi, masukan dan keluh kesah masyarakat Kabupaten Bima. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk menyampaikan aspirasi lewat tatap muka yang tentu jumlah pertemuannya sangat terbatas.

Sebagaimana dijelaskan UUD 1945 pasal 18 ayat 3 bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", Lebih jelasnya (Databoks.Katadata, 2022) merangkum dalam gambar berikut:



Gambar 1. Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia

Lebih lanjut UUD Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/ Kota) di Indonesia. Anggota DPRD memiliki tanggungjawab pada konstituen yaitu agen perumus agenda masyarakat, sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya, penganan peran integratif dalam masyarakatnya (Sianturi, dan Josmagel, 2014).

Dalam menjalankan perannya sebagai representasi rakyat, berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang UUD No. 23 Tahun 2014 DPRD juga mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya melalui kegiatan reses. Dimana hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam setahun terdapat 3 (tiga) kali masa reses yakni dilakukan setiap awal masa sidang, untuk DPRD kabupaten atau kota Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari. Selama rentang waktu tersebut secara serentak para wakil rakyat menyebar ke daerah pemilihan masing-masing, artinya di Kabupaten Bima terdapat 6 (enam) daerah pemilihan yang melingkupi 18 Kecamatan dan 191 Desa dengan jarak geografis antar wilayah yang cukup jauh dan medan yang sulit. Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, baik secara perseorangan maupun secara berkelom-

pok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Saat reses Para anggota DPRD akan menjaring dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan yaitu:

1. Pelaksanaan E-Reses

ALikasi E-Reses merupakan suatu terobosan yang harid ditingkatkan secara maksimal atau optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa, 2016) optimal berarti yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan yang paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Menurut Winardi optimal adalah ukuran yang dapat menyebabkan tercapainya tujuan (Winardi, 1996, Siringoringo 2005). Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan juga dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan pendukung lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangunan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaan. Peningkatan kualitas produktifitas pada tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja serta permasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metode peningkatan produktifitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas (Subandi, 2014).

2. Efektivitas E-Reses

Menurut Moenir (2006) menjelaskan efektifitas adalah pendapat di atas efektifitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Effendy (2003) efektifitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Menurut Sondang P. Siagian (2009), efektifitas adalah pemanfaatan pada sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Untuk melihat efektivitas, secara kualitatif dapat diukur pendekatan sasaran (goal approach), pendekatan sumber (system resource approach), pendekatan proses (internal process approach), dan juga pendekatan Konstituensi (constituencies approach). Sementara secara kuantitatif menurut Tangkilisan (2007) mengukur efektivitas e-reses dalam menjangkau aspirasi masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana dan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekretariat Kantor DPRD Kab. Bima. Penelitian menggunakan metode kualitatif-kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk deskriptif penggunaan aplikasi e-reses dan menyusun strategi DPRD dalam penjangkauan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi e-reses DPRD dalam penjangkauan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan angket atau kuisioner. Untuk analisis kualitatif, maka tahapan analisis data adalah tahap pengumpulan, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sementara tahapan analisis kuantitatif adalah uji validitas instrument, dengan stnadar menurut Ghozali (2018), apabila hasil nilai corrected item total correlation > 0.30 maka dikatakan valid. Selain itu, pertimbangan lain juga dapat dilihat dari nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ dinyatakan valid. Selanjtnya adalah uji reliabilitas yaitu dapat dilihat apabila nilai Cronbach' alpha (α) $\geq 0,60$ (Sugiyono, 2016). Sementara untu uji uji efektivitas aplikasi E-Reses dapat menggunakan uji one sample t-test dengan perbandingan nilai nilai sig (2-tailed) $< 0,05$ dan T hitung $> T$ tabel maka dikatakan efektif, sebaliknya jika nilai sig (2-tailed) $> 0,05$ dan T hitung $< T$ tabel, maka dikatakan tidak efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan E-Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan E-Reses.

Tahapan awal sebelum dimulainya pelaksanaan E-Reses adalah tahap perencanaan. Pola perencanaan E-Reses pada prinsipnya adalah bagian dari perencanaan kegiatan Reses secara konvensional sebagaimana yang berjalan selama ini. Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bima Edy Tarunawan, SH melalui kegiatan wawancara pada, 13 Juni 2022, pukul 10.00 Wita, menjelaskan:

“Sebelum Reses dimulai, Badan Musyawarah DPRD akan mengadakan rapat untuk menyusun dan menetapkan kapan waktu pelaksanaan Reses. Dalam rapat Badan Musyawarah tersebut biasanya disepakati berapa lama pelaksanaan Reses, kapan waktunya, dan tempatnya di daerah pemilihan masing-masing. Hasil dari Badan Musyawarah ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Dengan dasar itulah, kami di Sekretariat DPRD menyiapkan semua hal teknis untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima, termasuk menginformasikan kepada semua Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai jadwal pelaksanaan Reses”.

2. Pelaksanaan E-Reses.

E-Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima sebanyak 45 orang, baik secara berkelompok maupun peorangan yang tersebar dalam 6 daerah pemilihan, yaitu Dapil I sebanyak 8 orang, Dapil II sebanyak 7 orang, Dapil III sebanyak 6 orang, Dapil IV sebanyak 5 orang, Dapil V sebanyak 9 orang dan Dapil VI sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima dari Dapil II yang meliputi Kec. Bolo dan Madapangga Ilham Yusuf,SH pada Selasa, 14 Juni 2022, Pukul 12.00 wita mengungkapkan:

“Dengan adanya Aplikasi E-Reses ini, masyarakat di Dapil saya yang tidak bisa saya jangkau secara langsung karena keterbatasan waktu, bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Mereka langsung masuk lewat aplikasi E-Reses dan bebas menyampaikan aspirasi apapun kepada Anggota DPRD yang mereka kehendaki. Dan berdasarkan data base aspirasi atas nama saya lumayan sudah banyak aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat lewat E-Reses ini”.

3. Pelaporan E-Reses.

Proses rekapitulasi dan harmonisasi hasil penjarangan aspirasi masyarakat ini dilaksanakan dalam agenda Rapat pembahasan hasil Reses yang diikuti oleh semua anggota dewan di setiap Dapil. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhamad Aminurlah, SE Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima pada Kamis, 16 Juni 2022, Pukul 10.00 wita menjelaskan:

“Setelah agenda Reses selesai, maka dilaksanakan Rapat Dapil yaitu semua anggota DPRD di setiap Dapil membahas hasil penjarangan aspirasi masyarakat selama Reses. Aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui kunjungan lapangan dipadukan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Aplikasi E-Reses. Keduanya diharmonisasikan dan direkap untuk kemudian menjadi Laporan Akhir hasil Reses baik per-orangan maupun kelompok”.

B. Analisis Efektivitas E-Reses.

Merujuk pada teori efektivitas menurut Martani Huseini dan Hari Lubis (1987:55) terdapat tiga dimensi dalam mengukur efektivitas pelaksanaan E-Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, yang kemudian penulis tambahkan juga dengan dimensi pendekatan konstituensi, yaitu: Pendekatan sasaran (*goal approach*), Pendekatan sumber (*system resource approach*), Pendekatan proses (*internal process approach*) dan pada Pendekatan Konstituensi (*constituencies approach*).

1. Berdasarkan Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa diketahui salah satu ukuran tingkat

keberhasilan dari layanan yang disediakan adalah sejauhmana layanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat atau para penerima layanan. Dalam konteks penggunaan E-Reses, keberhasilannya antara lain ditentukan oleh mekanisme kerja dalam layanan tersebut, yang didukung juga oleh langkah-langkah evaluasi dan perbaikan berdasarkan respon dari masyarakat pengguna layanan. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Abdul Rahman, S. Sos selaku penanggungjawab Pengelolaan E-Reses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 09.00 Wita menjelaskan:

“Suatu tingkat keberhasilan tergantung dari bagaimana cara kerja dan kinerja dari pimpinan lalu kepada bawahannya dan bagaimana cara mengetahui suatu program pelayanan yang kami jalankan itu berhasil atau tidak itu biasa dibahas dalam rapat evaluasi kerja tiap minggu. Dalam hal ini penggunaan E-Reses dalam penjarangan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima keberhasilannya dapat dilihat dari tinggi rendahnya animo masyarakat memanfaatkan metode E-Reses untuk menyalurkan aspirasinya”.

2. Berdasarkan Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Dari hasil analisis melalui wawancara bahwa aplikasi E-Reses ini dioperasikan oleh tenaga yang menguasai bidang teknologi. Penyempurnaan program dan layanan informasi dalam aplikasi juga tetap dilakukan sebagai respon atas evaluasi, saran, dan masukan dari masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Bima Edy Tarunawan, SH pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 08.30 Wita:

“Untuk mendukung pelaksanaan E-Reses, kita tugaskan 1 (satu) orang sebagai admin yang ahli di bidang IT. Walaupun sesungguhnya kebutuhan tenaga admin masih lebih dari itu karena lewat E-Reses ini kita mengelola aspirasi 45 orang dari 6 Dapil. Sarana dan fasilitas pendukung juga sudah kita siapkan, walaupun masih

terus kita perbaharui atau ditambah agar lebih maksimal lagi pelayanan kita dalam pengelolaan E-Reses ini”.

3. Berdasarkan Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Layanan fitur yang disediakan dalam aplikasi E-Reses memang diarahkan untuk dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Masyarakat juga dapat menggunakan beragam fitur yang ada sesuai kebutuhan dan kepentingan. Berdasarkan hasil dari observasi langsung penulis, masyarakat pengguna E-Reses sangat senang dengan adanya layanan yang memungkinkan masyarakat bisa memilih langsung siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan konsep itu, setiap orang yang menyampaikan aspirasinya memiliki keyakinan yang tinggi bahwa aspirasinya tersalur dengan baik.

4. Berdasarkan Pendekatan Konstituensi (*Constituencies Approach*)

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis dan analisa dokumen data masyarakat pengguna E-Reses, semakin hari animo masyarakat menggunakan E-Reses dalam menyalurkan aspirasinya semakin tinggi. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa menyampaikan aspirasi menggunakan E-Reses jauh lebih efektif dan efisien sebagaimana diungkapkan M. Guntur Warga Desa Laju Kec. Langgudu pada di Desa Laju, Senin, 1 Agustus 2022 mengungkapkan:

“Saya lebih senang menyampaikan aspirasi melalui E-Reses dari pada hadir di pertemuan Reses di kantor kecamatan atau desa. Melalui E-Reses ini saya bebas menyampaikan aspirasi saya, tidak berebut dengan warga lainnya saat menyampaikan pandangan dan masukan sebagaimana pertemuan di kantor desa yang waktunya sangat terbatas sementara yang ingin menyampaikan usul saran sangat banyak”.

Selain itu, dilakukan pula uji kuantitatif. Untuk mendapatkan data kuantitatif, maka dilakukan penyebaran kusioner pada masyarakat. Dan yang melakukan pengujian kusioner sebanyak 50 masyarakat. Namun sebelum kusioner dibagikan, terlebih

dahulu kusioner tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

| Skor Rata-rata R_{hitung} | ketrangan | Cronbach's Alpha | ketrangan |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 0.689286 | Valid | 0.964 | Relia |

Dari hasil analisis SPSS pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > 0,300$ yang berarti instrumen tersebut valid. Begitupun dengan realibilitas, dapat dilihat dari nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, maka instrumen tersebut reliabilitas. Artinya bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk pengambilan data kualitatif untuk mengukur efektivitas e-reses. Selanjutnya setelah dianalisis menggunakan SPSS, diperoleh tabel berikut:

Tabel 2. Uji One-Sample Test

| Test Value = 45 | | | | |
|-----------------|-------|----|-----------------|-----------------|
| | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference |
| Efektivitas | 4.609 | 48 | .000 | 9.102 |

Dilihat dari tabel tersebut diatas, terlihat jelas nilai t_{hitung} adalah sebesar 4.609. begitupun dengan nilai sig nya adalah 0.000. mengacu pada bab sebelumnya, terlihat jelas bahwa sig (2-tailed) = 0.000 $< 0,05$, begitupun $T_{hitung} = 4.609 > T_{tabel} = 2.01$, maka dapat disimpulkan bahwa maka aplikasi e-reses DPRD dalam penjangkaran aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima sangat efektif.

C. Analisis Strategi Penggunaan E-Reses.

Untuk memperkuat dalam analisis data, Peneliti menggunakan Analisis SWOT menurut Siagian (2008:172), dimana analisis SWOT terdiri dari *strengths*, *weaknesses*, *opportunity*, *treaths* atau terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 4. Analisis SWOT Penggunaan E-Reses dalam Penjangkaran Aspirasi Masyarakat

| Kekuatan (<i>strengths</i>) |
|---|
| 1. Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menggunakan E-Reses. |
| 2. E-Reses adalah metode baru dalam penjangkaran aspirasi masyarakat. |
| 3. Dukungan sarana dan fasilitas penunjang dari |

Sekretariat DPRD, seperti Aplikasi E-Reses dan ruangan khusus untuk pusat pengelolaan aplikasi E-Reses.

4. Dukungan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kualifikasi baik dalam pengelolaan IT untuk menunjang pengelolaan E-Reses.

Kelemahan (weakness)

1. Sosialisasi terkait E-Reses masih kurang, belum semua masyarakat mengetahuinya.
2. Menu dan fitur Aplikasi E-Reses masih perlu disempurnakan, dibuat yang lebih simpel dan mudah digunakan oleh masyarakat.
3. Belum semua masyarakat memiliki HP Android, sehingga perlu disiapkan perangkat komputer khusus di setiap kantor kecamatan dan desa untuk digunakan secara umum oleh masyarakat.
4. Belum tersedia fitur dalam aplikasi yang menyajikan data aspirasi apa saja yang telah disampaikan masyarakat dan mana-mana saja yang sudah terealisasi.

Peluang (opportunities)

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima mengingat E-Reses akan meningkatkan kinerja perencanaan daerah yang lebih terintegrasi.
2. Potensi masyarakat yang dapat menyalurkan aspirasinya ke DPRD sangat besar, karena tidak terbatas ruang dan waktu.
3. E-Reses akan menjadi contoh / pelopor penggunaan teknologi dalam berbagai dimensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam penjangkaran aspirasi masyarakat.

Ancaman (threats)

1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pemahaman tentang teknologi.
2. Adanya keraguan dari masyarakat terhadap realisasi dari aspirasi yang mereka salurkan lewat E-Reses.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Aplikasi E-Reses

Pelaksanaan E-Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Dari hasil penelitian diatas, bahwa pada tahap perencanaan e-reses, kegiatan awal yang dilakukan adalah penyusunan jadwal E-Reses yang dilakukan Badan Musyawarah DPRD. Selanjutnya, bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bima akan menginformasikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terkait waktu dan tempat pelaksanaan E-Reses. Hasil penjadwalan jadwal oleh Badan Musyawarah inilah sebagai dasar operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Reses. Untuk tahapan

pelaksanaan E-Reses, penggunaan E-Reses tidak terbatas waktu, ruang dan tempat. Kapanpun masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD melalui penggunaan aplikasi E-Reses. Pada pelaksanaan E-Reses ini, dapat dilakukan kapanpun juga dan dimanapun. Bahkan dalam kondisi apapun bisa secara langsung menyuarakan aspirasinya kepada wakil mereka, bahkan masyarakat bisa menentukan sendiri kepada wakilnya yang mana mereka titipkan aspirasinya. Sementara tahapan pelaporan E-Reses, dapat mengintegrasikan reses konvensional dan e-reses. Kemudian menjadi dokumen akhir laporan Reses baik perorangan maupun per Dapil. Proses rekapitulasi dan harmonisasi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat ini dilaksanakan dalam agenda Rapat pembahasan hasil Reses yang diikuti oleh semua anggota dewan di setiap Dapil.

2. Efektivitas Penggunaan E-Reses

Secara kualitatif yaitu dalam sejumlah pendekatan sasaran (*goal approach*), pendekatan sumber (*system resource approach*), Pendekatan proses (*internal process approach*), dan pendekatan Konstituensi (*constituencies approach*), maka pelaksanaan e-reses ini sangat efektif. Hal lain juga dibuktikan oleh melalui analisis kuantitatif. Selain itu, pengujian efektivitas juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil pengujian diperoleh bahwa penggunaan aplikasi E-Reses tersebut sangat efektif, hal itu dapat dilihat dari nilai $T_{hitung} = 4.609 > T_{tabel} = 2.01$. Selain itu juga dapat dilakukan perbandingan nilai sig (2-tailed) = 0.000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa maka aplikasi e-reses DPRD dalam penjangkaran aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima sangat efektif.

a) Strategi E-Reses.

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan strategi penggunaan aplikasi E-Reses dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang E-Reses mendukung pemanfaatan E-Reses.
- 2) Meningkatkan SDM pengelola E-Reses yang lebih profesional.
- 3) Meningkatkan sosialisasi terkait E-Reses untuk membangun kesadaran masyarakat.

- 4) Mengingat Aplikasi E-Reses ini adalah cara baru dalam penjangkaran aspirasi masyarakat.
- 5) Memfasilitasi penyiapan perangkat komputer khusus di setiap kantor desa dan kecamatan.
- 6) Melengkapi/menyempurnakan fitur dalam aplikasi E-Reses.
- 7) Menyiapkan menu khusus dalam Aplikasi E-Reses.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan E-Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Perencanaan E-Reses dimulai lewat penjadwalan, tahapan pelaksanaan E-Reses dilaksanakan oleh semua Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang berjumlah 45 orang yang terbagi dalam 6 daerah pemilihan. Sementara itu pada tahapan pelaporan. Sistem pelaporannya disampaikan secara perorangan dan kelompok (Dapil).
2. Penggunaan E-Reses dalam penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, ternyata jauh lebih efektif dibanding pelaksanaan Reses konvensional kunjungan langsung ke kontituen. Hal itu juga diperkuat dengan melihat hasil dari pengukuran menggunakan pendekatan kuantitatif yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS.
3. Strategi Penggunaan E-Reses dapat juga dilakukan dengan sejumlah cara seperti meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang E-Reses, meningkatkan SDM pengelola E-Reses, meningkatkan sosialisasi terkait E-Reses, memfasilitasi penyiapan perangkat computer, melengkapi/menyempurnakan fitur dalam aplikasi E-Reses, dan menyiapkan menu khusus dalam Aplikasi E-Reses.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Metode penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Aplikasi E-Reses dapat menjadi pemicu terutama pada proses penjangkaran

aspirasi masyarakat oleh Bupati dalam tahapan Musrenbang.

2. Kedepan Aplikasi E-Reses ini perlu dilakukan proses penyesuaian atau harmonisasi dengan Aplikasi E-Pokir DPRD yang pada dasarnya basis data dari E-Pokir adalah hasil Reses DPRD.

DAFTAR RUJUKAN

APJII. (2022). Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya.

Databoks.Katadata. (2022). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. In Databoks (p. 2022). <https://databoks.katadata.co.id/datapublik/hembed/130292/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

Kamus Besar Bahasa. (2016). Hasil Pencarian - KBBI Daring. In Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pesisirbaratkab. (2022). Profil | DPRD - Kabupaten Pesisir Barat. <https://pesisirbaratkab.go.id/dprd/profil>

PP Nomor 12 Tahun 2018. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 2, 10-27.

UUD, & 2014, N. 17 T. (2014). Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. 42, 383.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti

Hotniar Siringoringo, 2005, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Josmagel Harapan Sianturi. 2014, Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013).

- Martani dan Lubis, 1987, Teori Organisasi, Ghalia Indonesia, Bandung,
- Moenir, H.A.S, 2006. Menejemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara
- Sondang. P Siagian. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi, 2014, Ekonomi Pembangunan, Alfabeta, Bandung, hal. 111
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Edisi Revisi.). Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia
- Winardi, 1996, Pengantar Manajemen Penjualan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Winda. (2016). Etika Komunikasi Anggota Dprd Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat